

MEMAHAMI SEBARAN KINERJA PENDIDIKAN INDONESIA: STUDI NERACA PENDIDIKAN DAERAH

Understanding the Distribution of Indonesia's Education Performance: Study of Regional Education Balance Sheet

Marihot Nasution

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: marihot.nasution@dpr.go.id

Abstract

This study examines the differences in the results of education development in Indonesia by differentiating these results by region. This is done to determine the weaknesses and weaknesses of each region so that subsequent development is directed to cover up existing weaknesses. The comparison of the regions is carried out by using the different test of the western and eastern regions on the performance of education development recorded in Neraca Pendidikan Daerah 2018/2019 published by the Ministry of Education and Culture. The results of the study note that educational performance in the western and eastern regions of Indonesia has a statistically significant difference. Especially in performance as measured by pure participation rates and national examination results at all levels of education tested. The eastern region has a weaker educational performance than the western region of Indonesia. This needs to be a concern for the government if it wants to reduce development inequality in the education sector.

Keywords: Education, Regional Education Balance Sheet, Western and Eastern Regions of Indonesia

1. Pendahuluan

Indonesia telah memperkenalkan paket komprehensif reformasi pendidikan yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Komponen utama dari proses reformasi tersebut adalah pelimpahan tanggung jawab atas layanan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah dan sekolah. Reformasi ini, ditambah dengan peningkatan investasi pemerintah dalam bidang pendidikan telah menghasilkan peningkatan akses pendidikan yang signifikan terutama bagi anak-anak miskin. Namun, peningkatan prestasi belajar yang dicapai masih belum signifikan dan anak-anak masih meninggalkan sekolah dengan keterampilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar

tenaga kerja. Seperti halnya sistem pendidikan lain di seluruh dunia, peningkatan kualitas pendidikan dasar terus menjadi tantangan utama.

Sebagian besar pembiayaan publik untuk pendidikan di Indonesia berasal dari pemerintah pusat namun dikelola pengalokasiannya di tingkat daerah. Proses ini dilakukan dalam rangka desentralisasi, dimana pemerintah pusat mendukung penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah melalui transfer fiskal. Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal dari pemerintah pusat, tetapi hampir dua pertiga dari pengeluaran pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp492 triliun untuk pendidikan pada tahun 2019. Dari jumlah ini, Rp52 triliun untuk layanan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dialokasikan Rp36 triliun. Mayoritas, Rp308 triliun, ditransfer ke pemerintah daerah (Peraturan Presiden 107/2017, Peraturan Presiden 129/2018), dan sisanya dialokasikan untuk pendidikan tinggi dan belanja pendidikan lainnya. Meskipun demikian, proses desentralisasi justru menggarisbawahi lemahnya *check and balance* dalam penyediaan layanan pendidikan. Desentralisasi sangat cocok untuk sistem besar seperti Indonesia, namun kabupaten yang kecil cenderung memiliki kapasitas rendah untuk mengelola layanan pendidikan mereka, hal tersebut berdampak negatif pada efisiensi pengeluaran dan pembelajaran siswa (Al-Samarrai 2013, Bank Dunia 2018a). Proses desentralisasi juga mengungkapkan sistem *check and balance* yang lemah dalam pemberian layanan pendidikan antara tingkat pusat dan daerah, dan di antara tingkat daerah sendiri (Al-Samarrai 2013; Bank Dunia 2017).

Lemahnya *check and balances* tersebut dapat mendasari hadirnya kesenjangan pendidikan antar wilayah. Hingga kini, pembelajaran berkualitas belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil PISA (Program for International Student Assessment) tahun 2015 menunjukkan bahwa proporsi siswa di Indonesia yang berada di atas standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia. Informasi tersebut perlu dikaji secara seksama sebagai upaya *monitoring* atas strategi yang telah dilaksanakan. Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan evaluasi yang dapat mendukung Sistem Pendidikan Nasional serta menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dengan menelaah sebaran indikator pendidikan di Indonesia dan melihat letak kesenjangan dalam indikator pembangunan pendidikan.

2. Tinjauan Pustaka

Sistem pendidikan Indonesia sangat kompleks dan sangat besar. Ini adalah sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia dengan 3,9 persen populasi siswa dunia. Sistem formal secara kolektif mempekerjakan 3,3 juta guru yang mendidik 53,1 juta anak di kelas 1 hingga 12 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Tambahan 231.446 pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendukung pembelajaran awal dari 7,4 juta anak (DAPODIK 2019, Kemendikbud, 2019). Dan 4.670 institusi pendidikan tinggi menyediakan layanan untuk 8 juta siswa. Sistem pelatihan kejuruan non formal terdiri dari lebih dari 40.000 lembaga di bawah pengawasan Kemendikbud dan Kementerian Tenaga Kerja, serta beberapa kementerian lini (DAPODIK 2019, Kemendikbud, 2019).

Sistem pendidikan tersebut dibiayai dengan 20 persen anggaran negara yang merupakan mandat undang-undang. Jika melihat total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 2.080 triliun, maka *mandatory spending* anggaran pendidikan 20 persen dari APBN adalah sekitar 416,1 triliun. Dan jumlah ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara (K/L). Anggaran Kemendikbud tahun 2019 adalah sebesar 39,8 triliun. Jumlah tersebut terbesar ke-8 diantara 10 kementerian dengan APBN tertinggi. Selain itu, anggaran tambahan untuk pendidikan dasar diperoleh dari pertambahan minyak bumi sebesar 0,5 persen di daerah yang bersangkutan sesuai UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 20. Pemerintah telah membuat sasaran pendidikan dalam Nota Keuangan tahun 2019 ini. Pertama, rehabilitasi ruang belajar yang meliputi 54.739 ruang (pusat) dan 27.140 ruang (daerah) dengan rincian: SD: 15.420 ruang, SMP: 8.720 ruang dan SMA: 3.000 ruang. Kedua, tunjangan profesi untuk guru (Pegawai Negeri Sipil Daerah) PNSD sebanyak 1,3 juta guru, tunjangan khusus guru PNSD khusus sebanyak 41,6 ribu guru, dan tunjangan sertifikasi dosen 102,7 ribu dosen. Ketiga, Kartu Indonesia Pintar dengan total 19,7 juta siswa, dengan rincian: SD sebesar Rp450 ribu/siswa per tahun, SMP sebesar Rp750 ribu/siswa per tahun, SMA-SMK sebesar Rp1 juta/siswa per tahun. Keempat, Bantuan Bidik Misi untuk 362,7 ribu mahasiswa, dengan rincian: ke Perguruan Tinggi (PT) untuk uang kuliah sebesar Rp2,4 juta/mahasiswa per semester, dan ke mahasiswa sebesar Rp3,9 juta/mahasiswa per semester. Kelima, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 8,5 juta siswa (pusat) dengan rincian: MI sebesar Rp800 ribu/siswa per tahun, dan MTs sebesar Rp1 juta/siswa per tahun. Selain itu BOS diperuntukkan 46,2 juta siswa (Daerah), dengan rincian: SD/SDLB sebesar Rp800 ribu/siswa per tahun, SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp1 juta/siswa per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp1,4 juta/siswa per tahun.

Meski pemerintah telah membuat sasaran pendidikan, dan hal ini telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya, namun masih banyak persoalan umum pendidikan di Indonesia. Fokus utama dalam pembangunan pendidikan hingga kini masih pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Sebagaimana dikutip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN) 2015-2019, tantangan dalam pembangunan pendidikan salah satunya adalah menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah, dan antar jenis kelamin. Tahun 2019 merupakan akhir periode RPJMN 2015-2019. Dalam periode pembangunan ini tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah belum memadainya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia.

Dalam kurun waktu 2009-2019, anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN mencapai Rp3.920,45 triliun. Selama periode waktu tersebut, jumlah anggaran pendidikan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mendanai sektor pendidikan dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah melalui transfer fiskal. Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal dari pemerintah pusat, namun hampir dua pertiga dari pengeluaran pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten. Selain itu, pemerintah daerah sendiri wajib mengalokasikan 20 persen dari anggaran daerahnya untuk pendidikan. Hal ini menekankan tingginya peran pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan.

Sejalan dengan proses desentralisasi secara keseluruhan, Indonesia sejak 1999 telah mendesentralisasi sistem pendidikan sehingga sekarang melibatkan banyak aktor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan sekolah (UU 23/2014 tentang Otonomi Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan). Implikasi dari otonomi daerah ini adalah bahwa penyediaan pendidikan dasar dan menengah dialihkan ke pemerintah daerah di tingkat kabupaten. Sementara itu, wewenang pemerintah daerah provinsi diperuntukkan bagi pendidikan menengah atas. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hasil pembangunan pendidikan akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunannya.

Berdasarkan kajian dari World Bank yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam kinerja pembangunan pendidikan menyatakan bahwa secara keseluruhan, keputusan yang dibuat kabupaten tentang pembiayaan pendidikan, campuran input pendidikan untuk digunakan dan distribusinya tampaknya sangat terkait dengan hasil pendidikan. Misalnya, kabupaten yang memprioritaskan layanan pendidikan dan mencurahkan bagian lebih besar dari anggaran mereka untuk pendidikan cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih baik. Kajian ini juga menyatakan bahwa kabupaten yang dikelola lebih baik, memiliki proporsi sekolah yang lebih besar jumlah guru yang tepat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, kinerja pendidikan lebih tinggi di kabupaten-kabupaten yang memiliki upaya lebih besar untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi tentang penggunaan sumber daya publik. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kinerja lebih baik di kabupaten yang mendorong partisipasi yang lebih besar dari

pemangku kepentingan utama (misalnya dewan pendidikan lokal) dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Kinerja pendidikan juga cenderung lebih lemah di kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Ini menyoroti tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh kabupaten miskin dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bahkan setelah mengendalikan tata kelola dan keseluruhan ukuran anggaran pemerintah. Hasilnya menunjukkan, misalnya, bahwa kabupaten yang lebih miskin cenderung memiliki proporsi tenaga pengajar yang lebih kecil untuk didistribusikan sesuai dengan standar nasional. Ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi dalam mengalokasikan guru ke daerah miskin dan terpencil (lihat misalnya, UNCEN, UNIPA et al. 2012).

Kualitas tata kelola lokal secara keseluruhan juga terkait positif dengan rata-rata tingkat partisipasi sekolah dasar dan menengah pertama tetapi tidak signifikan secara statistik. Namun, kabupaten dengan tata kelola keseluruhan yang lebih baik tampaknya memiliki hasil ujian nasional yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten yang kinerjanya lebih buruk. Transparansi dan akuntabilitas kembali menonjol karena memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan hasil pendidikan. Ketika masing-masing komponen indeks tata kelola digunakan dalam analisis, transparansi dan indeks kelonggaran berhubungan positif dengan tingkat partisipasi dan nilai ujian. Asosiasi ini juga signifikan secara statistik.

3. Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang terdiri atas 542 pemerintah daerah. Data yang diambil merupakan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun ajaran 2018/2019. NPD merupakan data yang menampilkan dan menyajikan potret, informasi, kondisi, dan capaian pendidikan di suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota). Data tersebut diterbitkan oleh Kemendikbud. Penelitian ini memberikan gambaran *snapshot* evaluasi pembangunan pendidikan di tahun 2018/2019, 15 tahun sejak UU Sisdiknas diterbitkan.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa studi ini menguji perbedaan kondisi pembangunan pendidikan di wilayah Indonesia dengan beragam kriteria yang dimiliki tiap daerah. Kriteria tersebut antara lain: a) daerah tertinggal/perbatasan atau tidak; b) kabupaten, kota atau provinsi; dan d) kawasan barat Indonesia atau kawasan timur Indonesia. Kriteria ini dipilih untuk menunjukkan perbedaan pembangunan pendidikan berdasarkan kondisi geografis dan karakter pengelolaan pemerintahan daerah khususnya di bidang pendidikan. Kriteria kelima yang juga digunakan adalah pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan dari penerapan *mandatory spending* pendidikan 20 persen dari APBD serta besarnya alokasi anggaran pendidikan dibanding dana Transfer ke Daerah. Kriteria ini dipilih untuk menunjukkan perbedaan pembangunan pendidikan di daerah sesuai dengan pengelolaan keuangannya.

Sementara itu, pembangunan pendidikan ditunjukkan dari beberapa pencapaian kinerja pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), kondisi ruang kelas, kondisi guru bersertifikat dan berijazah D4/S1, rasio guru dan murid, dan hasil ujian nasional (UN). pencapaian kinerja yang diukur merupakan pencapaian di level pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pengujian dilakukan dengan uji beda *t-test* dan deskripsi statistik atas sebaran data yang ada. Uji beda *t-test* digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda *t-test* dilakukan melalui Microsoft Excel dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan *standard error* dari perbedaan rata-rata dua sampel. Sedangkan deskripsi statistik untuk menggambarkan kondisi sebaran data demi memahami keadaan pembangunan pendidikan Indonesia. Hasil uji beda *t-test* ini akan digambarkan dari nilai *p-value* (sig.). Jika nilai *p-value*/sig. kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan antara sampel yang dibandingkan, dan sebaliknya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Dari pengumpulan data diperoleh 542 pemerintah daerah yang memiliki data lengkap yang diperoleh dari NPD. Data tersebut merupakan jumlah seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif atas data yang diperoleh. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa rata-rata pemerintah daerah hanya mengalokasikan 12,59 persen dari APBD-nya untuk pendidikan di daerahnya. Angka tersebut di luar jumlah transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mematuhi amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang mengharuskan agar pemerintah daerah mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Indonesia

	Mean	Median	Standard Deviation	Range	Minimum	Maximum	Sum	Count
APBD (mil. Rp)	2,290.63	1,393.85	4,467.73	80,327.82	574.27	80,902.09	1,241,522.43	542
APBD Pendidikan (mil. Rp)	271.88	149.20	715.42	14,801.59	(125.99)	14,675.60	147,357.76	542
Transfer ke Daerah Bid. Pendidikan (mil. Rp)	359.31	182.50	825.43	11,443.60	5.60	11,449.20	194,747.82	542
Belanja Pendidikan Daerah	631.19	335.65	1,366.48	18,128.34	60.50	18,188.84	342,105.58	542
Persentase Belanja Pendidikan Daerah	12.59	12.61	4.82	37.08	(7.88)	29.20	6,824.63	542
APK PAUD (%)	39.01	35.06	21.40	180.47	-	180.47	21,144.65	542
APK SD (%)	102.84	104.10	6.73	38.40	76.16	114.56	55,737.97	542
APK SMP (%)	99.81	101.53	10.62	71.30	43.36	114.66	54,095.65	542
APK SMA (%)	89.47	91.53	16.45	108.24	11.91	120.15	48,491.54	542
APM SD (%)	89.46	91.28	7.26	61.05	38.94	99.99	48,485.34	542
APM SMP (%)	73.02	74.59	9.48	64.12	24.53	88.65	39,576.08	542
APM SMA (%)	66.88	67.67	12.59	86.64	10.21	96.85	36,249.73	542
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.10	0.08	0.09	1.00	-	1.00	55.06	542
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.19	0.18	0.15	3.07	(2.28)	0.78	104.63	542
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.19	0.18	0.11	0.89	(0.29)	0.60	101.31	542
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.11	0.09	0.10	0.55	-	0.55	62.11	542
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.06	0.04	0.07	0.58	-	0.58	31.24	542
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	47.68	48.95	27.28	559.00	-	559.00	25,843.30	542
Persen. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	27.16	23.85	17.73	76.40	-	76.40	14,722.90	542
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	85.17	86.60	36.46	859.90	23.10	883.00	46,163.90	542
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	44.11	46.80	14.44	92.10	-	92.10	23,905.70	542
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	93.34	94.40	4.49	39.40	60.30	99.70	50,590.20	542
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	45.43	44.90	17.34	86.40	-	86.40	24,623.70	542
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.49	98.10	4.48	92.20	7.80	100.00	52,841.90	542
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	46.44	47.00	17.04	87.70	1.90	89.60	25,168.30	542
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	94.04	95.50	8.98	100.00	-	100.00	50,968.20	542
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	34.28	34.20	15.00	86.30	-	86.30	18,580.80	542
Rasio Guru Murid SD	0.07	0.06	0.02	0.13	0.01	0.14	35.50	542
Rasio Guru Murid SMP	0.08	0.07	0.02	0.13	0.04	0.17	40.93	542
Rasio Guru Murid SMA	0.07	0.07	0.02	0.16	0.04	0.20	38.54	542
Rasio Guru Murid SMK	0.08	0.08	0.03	0.25	-	0.25	43.98	542
Hasil UN SMP	62.66	49.80	266.17	6,209.42	36.58	6,246.00	33,962.06	542
Hasil UN SMA IPA	49.85	48.62	7.44	71.91	-	71.91	27,017.51	542
Hasil UN SMA IPS	45.21	43.91	6.57	38.90	30.50	69.40	24,504.97	542
Hasil UN SMK	43.70	43.34	5.97	64.97	-	64.97	23,686.83	542

Sumber: data diolah

Untuk melihat kondisi pendidikan Indonesia sesungguhnya perlu membandingkan data keseluruhan dengan data per kawasan. Seperti disampaikan sebelumnya pembagian kawasan akan dilakukan dengan membagi wilayah Indonesia menjadi kawasan barat dan timur. Kawasan barat meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Kawasan timur terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Perbedaan ini menghasilkan 293 pemerintah daerah di kawasan barat dan 249 pemerintah daerah di kawasan timur. Pemerintah daerah ini terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Di dalam kawasan tersebut terdapat pula daerah tertinggal dan daerah perbatasan yang memiliki kondisi pembangunan yang lemah dibanding daerah lainnya. Selain itu, masing-masing daerah memiliki

kondisi pengelolaan keuangan khususnya di bidang pendidikan yang berbeda pula. Terdapat daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan UU Sisdiknas, 20 persen dari APBD, namun banyak pula daerah yang tidak mengalokasikan sejumlah tersebut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Kawasan Barat Indonesia

Kawasan Barat Indonesia								
	Mean	Median	Standard Deviation	Range	Minimum	Maximum	Sum	Count
APBD (mil. Rp)	2,861.43	1,760.96	5,859.81	80,327.82	574.27	80,902.09	838,398.30	293
APBD Pendidikan (mil. Rp)	364.61	188.60	951.61	14,796.09	(120.49)	14,675.60	106,831.51	293
Transfer ke Daerah Bid. Pendidikan (mil. Rp)	481.37	258.30	1,065.30	11,419.30	29.90	11,449.20	141,039.98	293
Belanja Pendidikan Daerah (mil. Rp)	845.98	500.20	1,778.29	18,111.64	77.20	18,188.84	247,871.49	293
Persentase Belanja Pendidikan Daerah	13.74	13.68	4.96	36.06	(7.88)	28.18	4,024.52	293
APK PAUD (%)	43.11	37.49	22.25	180.47	-	180.47	12,631.83	293
APK SD (%)	102.98	103.85	5.50	37.78	76.16	113.94	30,172.62	293
APK SMP (%)	100.82	101.26	5.24	44.41	69.99	114.40	29,539.38	293
APK SMA (%)	91.12	91.78	12.60	61.38	58.77	120.15	26,697.96	293
APM SD (%)	91.19	91.93	5.79	61.05	38.94	99.99	26,719.20	293
APM SMP (%)	75.52	75.33	4.98	29.37	59.28	88.65	22,127.61	293
APM SMA (%)	69.37	69.00	10.62	53.93	42.92	96.85	20,324.62	293
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.09	0.07	0.06	0.46	0.01	0.46	25.78	293
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.17	0.16	0.10	0.84	(0.31)	0.52	49.45	293
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.17	0.17	0.10	0.85	(0.29)	0.56	50.53	293
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.11	0.08	0.09	0.54	-	0.54	30.99	293
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.05	0.03	0.07	0.47	-	0.47	15.01	293
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	52.05	51.10	32.49	549.40	9.60	559.00	15,250.80	293
Persen. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	32.35	32.10	17.64	76.40	-	76.40	9,477.20	293
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	91.69	91.30	46.87	825.10	57.90	883.00	26,864.30	293
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	49.92	50.50	10.21	77.20	14.90	92.10	14,627.40	293
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.40	94.80	3.09	29.90	69.80	99.70	27,659.00	293
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	51.38	51.10	15.75	72.80	13.60	86.40	15,055.40	293
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.87	98.00	1.18	7.30	92.70	100.00	28,676.50	293
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	52.90	53.30	14.80	78.80	10.80	89.60	15,498.50	293
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	95.06	95.80	3.59	31.00	69.00	100.00	27,851.90	293
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	36.75	36.20	14.47	80.60	4.60	85.20	10,768.90	293
Rasio Guru Murid SD	0.06	0.06	0.02	0.11	0.04	0.14	18.82	293
Rasio Guru Murid SMP	0.07	0.07	0.02	0.13	0.04	0.17	21.13	293
Rasio Guru Murid SMA	0.07	0.07	0.02	0.13	0.04	0.17	20.25	293
Rasio Guru Murid SMK	0.07	0.07	0.03	0.21	0.04	0.25	21.65	293
Hasil UN SMP	73.10	50.90	361.91	6,205.61	40.39	6,246.00	21,419.38	293
Hasil UN SMA IPA	52.74	51.58	7.40	33.28	38.63	71.91	15,451.39	293
Hasil UN SMA IPS	47.57	46.07	6.73	34.07	35.33	69.40	13,937.01	293
Hasil UN SMK	45.74	45.03	4.39	23.65	37.19	60.84	13,401.53	293

Sumber: data diolah

Dengan membandingkan hasil di Tabel 1 dan Tabel 2, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk seluruh indikator pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah di kawasan barat Indonesia memiliki angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sebaliknya, kondisi di kawasan timur Indonesia (Tabel 3) memiliki angka rata-rata indikator pendidikan yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini berarti kondisi pendidikan di kawasan timur Indonesia masih tertinggal dari kawasan barat. Dilihat dari fasilitas pendidikan dan kualitas pengajar, kawasan timur memiliki kondisi yang lebih lemah daripada kawasan barat. Hal ini dapat memengaruhi pencapaian indikator pendidikan seperti APK/APM dan

hasil ujian nasional, dimana kawasan timur memiliki pencapaian yang lebih rendah dari kawasan barat.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Kawasan Timur Indonesia

Kawasan Timur Indonesia								
	Mean	Median	Standard Deviation	Range	Minimum	Maximum	Sum	Count
APBD (mil. Rp)	1,618.97	1,232.95	1,508.53	13,340.95	587.17	13,928.12	403,124.13	249
APBD Pendidikan (mil. Rp)	162.76	118.30	167.85	1,304.29	(125.99)	1,178.30	40,526.25	249
Transfer ke Daerah Bid. Pendidikan (mil. Rp)	215.69	135.80	334.32	3,281.09	5.60	3,286.69	53,707.84	249
Belanja Pendidikan Daerah (mil. Rp)	378.45	249.50	480.96	4,370.89	60.50	4,431.39	94,234.09	249
Persentase Belanja Pendidikan Daerah	11.25	11.16	4.28	36.81	(7.61)	29.20	2,800.11	249
APK PAUD (%)	34.19	31.99	19.30	121.68	-	121.68	8,512.82	249
APK SD (%)	102.67	104.69	7.94	34.50	80.06	114.56	25,565.35	249
APK SMP (%)	98.62	102.44	14.52	71.30	43.36	114.66	24,556.27	249
APK SMA (%)	87.52	91.43	19.91	102.59	11.91	114.50	21,793.58	249
APM SD (%)	87.41	90.08	8.24	40.35	59.08	99.43	21,766.14	249
APM SMP (%)	70.07	73.48	12.29	61.00	24.53	85.53	17,448.47	249
APM SMA (%)	63.96	66.49	14.04	82.29	10.21	92.50	15,925.11	249
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.12	0.10	0.11	1.00	-	1.00	29.27	249
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.22	0.22	0.20	3.07	(2.28)	0.78	55.18	249
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.20	0.19	0.11	0.72	(0.11)	0.60	50.50	249
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.12	0.11	0.13	1.61	(1.06)	0.55	29.87	249
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.07	0.04	0.08	0.58	-	0.58	16.23	249
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	42.54	45.00	18.20	80.50	-	80.50	10,592.50	249
Persen. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	21.07	18.40	15.83	71.40	-	71.40	5,245.70	249
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	77.51	81.60	14.25	74.10	23.10	97.20	19,299.60	249
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	37.26	39.60	15.67	72.10	-	72.10	9,278.30	249
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	92.09	93.70	5.47	38.70	60.30	99.00	22,931.20	249
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	38.43	39.10	16.52	77.20	-	77.20	9,568.30	249
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.05	98.10	6.46	92.20	7.80	100.00	24,165.40	249
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	38.83	38.40	16.37	81.90	1.90	83.80	9,669.80	249
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	92.84	94.90	12.57	100.00	-	100.00	23,116.30	249
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	31.37	31.10	15.12	86.30	-	86.30	7,811.90	249
Rasio Guru Murid SD	0.07	0.07	0.02	0.11	0.01	0.13	16.67	249
Rasio Guru Murid SMP	0.08	0.08	0.02	0.13	0.04	0.17	19.80	249
Rasio Guru Murid SMA	0.07	0.07	0.02	0.15	0.05	0.20	18.28	249
Rasio Guru Murid SMK	0.09	0.08	0.03	0.25	-	0.25	22.33	249
Hasil UN SMP	50.37	49.11	6.42	47.29	36.58	83.87	12,542.68	249
Hasil UN SMA IPA	46.45	46.50	5.91	66.26	-	66.26	11,566.12	249
Hasil UN SMA IPS	42.44	41.96	5.16	31.91	30.50	62.41	10,567.96	249
Hasil UN SMK	41.31	41.48	6.67	64.97	-	64.97	10,285.30	249

Sumber: data diolah

4.2. Hasil Pengujian Empiris

Seperti disampaikan sebelumnya, diperoleh 293 pemerintah daerah di kawasan barat dan 249 pemerintah daerah di kawasan timur. Dari hasil uji beda atas wilayah kawasan barat dan timur Indonesia, kedua wilayah memiliki banyak perbedaan yang signifikan secara statistik dalam indikator pendidikannya (Tabel 4). Hal ini menandakan bahwa kondisi di timur Indonesia lebih lemah daripada kondisi di kawasan barat ($p\text{-value/sig.} > 0,05$). Namun perbandingan ini belum memisahkan daerah yang tertinggal dan daerah perbatasan yang memiliki kondisi pembangunan jauh lebih rendah dari daerah sekitarnya. Secara rinci, indikator pendidikan yang tidak memiliki perbedaan signifikan hanya APK SD ($\text{sig. } 0,2990 > 0,05$). Hal ini perlu menjadi perhatian

pemerintah dalam memfokuskan pembangunan pendidikan. Perhatian ini tidak hanya dalam pengalokasian anggaran, namun juga pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan, seperti penyediaan ruang kelas yang layak serta guru berijazah sarjana dan bersertifikat di kawasan timur Indonesia.

Beberapa indikator seperti persentase jumlah ruang kelas rusak berat memiliki t-hitung dengan nilai negatif. Hal ini menandakan bahwa kondisi di wilayah timur mayoritas memiliki nilai persentase yang lebih tinggi dibanding kawasan barat Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dalam memusatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah timur. Meskipun perbedaannya tidak signifikan namun hal ini cukup menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur pendidikan khususnya ruang kelas untuk mengurangi persentase jumlah ruang kelas rusak, hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah pendidikan lebih banyak namun mengalokasikan anggaran langsung dari pusat untuk pembiayaan pembangunan ruang kelas juga mengawasi pelaksanaan pembangunannya.

Tabel 4. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Indikator	Rata-rata		Varians		t-hitung	p-value (sig. 0,05)	t-tabel
	KBI	KTI	KBI	KTI			
APK PAUD (%)	43.1120	34.1880	495.1434	372.3343	4.9430	0.0000	1.6477
APK SD (%)	102.9782	102.6721	30.2806	63.0593	0.5275	0.2990	1.6477
APK SMP (%)	100.8170	98.6196	27.4693	210.8442	2.4124	0.0081	1.6477
APK SMA (%)	91.1193	87.5244	158.7764	396.6072	2.5477	0.0056	1.6477
APM SD (%)	91.1918	87.4142	33.5574	67.8301	6.2422	0.0000	1.6477
APM SMP (%)	75.5209	70.0742	24.8207	150.9240	6.9474	0.0000	1.6477
APM SMA (%)	69.3673	63.9563	112.7575	197.1931	5.0999	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.0880	0.1176	0.0040	0.0121	-3.9089	0.0001	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.1703	0.2315	0.0090	0.0135	-6.7552	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.1736	0.2039	0.0101	0.0114	-3.4025	0.0004	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.1058	0.1250	0.0084	0.0101	-2.3226	0.0103	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.0512	0.0652	0.0044	0.0067	-2.1904	0.0145	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	50.3334	42.5402	172.3181	331.2898	5.7727	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	32.3454	21.0671	311.0700	250.6795	7.7737	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	88.9747	77.5084	45.4158	203.1492	12.2541	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	49.9229	37.2622	104.2137	245.4553	11.2965	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.3993	92.0932	9.5592	29.8902	6.1550	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	51.3836	38.4269	247.9320	272.7817	9.3345	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.8720	97.0498	1.3871	41.7839	2.1363	0.0166	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	52.8959	38.8345	218.9076	268.0091	10.4988	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	95.0577	92.8365	12.8924	158.0384	2.8892	0.0020	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	36.7539	31.3731	209.2684	228.6710	4.2265	0.0000	1.6477
Rasio Guru Murid SD	0.0642	0.0670	0.0003	0.0004	-1.6412	0.0507	1.6477
Rasio Guru Murid SMP	0.0721	0.0795	0.0005	0.0004	-4.0988	0.0000	1.6477
Rasio Guru Murid SMA	0.0691	0.0734	0.0003	0.0003	-2.8222	0.0025	1.6477
Rasio Guru Murid SMK	0.0739	0.0897	0.0008	0.0011	-5.8865	0.0000	1.6477
Hasil UN SMP	51.9995	50.3722	40.5066	41.1952	2.9548	0.0016	1.6477
Hasil UN SMA IPA	52.7351	46.4503	54.7057	34.8845	10.7977	0.0000	1.6477
Hasil UN SMA IPS	47.5666	42.4416	45.2931	26.6046	9.8137	0.0000	1.6477
Hasil UN SMK	45.7390	41.3064	19.2747	44.4851	9.2586	0.0000	1.6477

Sumber: data diolah

Dengan memisahkan daerah tertinggal dan perbatasan, diperoleh hasil uji beda seperti disajikan di Tabel 5. Pemisahan daerah tertinggal dan perbatasan ini penting untuk dapat membandingkan pemerintah daerah yang memiliki fase pembangunan yang kurang lebih serupa. Pemisahan tersebut menghasilkan

jumlah sampel yang diuji sebanyak 260 pemerintah daerah di kawasan barat Indonesia dan 139 pemerintah daerah di kawasan timur. Hasil uji beda *t-test* untuk kawasan barat dan timur Indonesia tanpa daerah tertinggal dan perbatasan menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil sebelumnya, dimana terdapat perbedaan yang signifikan dalam indikator pendidikan untuk kedua kawasan tersebut.

Tabel 5. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances - Tanpa Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Indikator	Rata-rata		Varians		t-hitung	p-value (sig. 0,05)	t-tabel
	KBI	KTI	KBI	KTI			
APK PAUD (%)	44.3134	37.0863	503.8270	277.3905	3.3359	0.0005	1.6487
APK SD (%)	103.2997	103.5035	23.2182	38.4678	-0.3633	0.3583	1.6487
APK SMP (%)	100.9631	102.3243	24.7145	85.4686	-1.9136	0.0282	1.6487
APK SMA (%)	91.5517	93.3424	157.3286	176.7788	-1.3304	0.0921	1.6487
APM SD (%)	91.6973	89.6687	27.5970	40.5787	3.4071	0.0004	1.6487
APM SMP (%)	75.9770	73.0709	22.9092	67.7593	4.4575	0.0000	1.6487
APM SMA (%)	69.8204	66.9419	111.4037	90.9521	2.6826	0.0038	1.6487
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.0845	0.0946	0.0035	0.0048	-1.5358	0.0627	1.6487
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.1620	0.2087	0.0080	0.0112	-4.6756	0.0000	1.6487
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.1687	0.1889	0.0093	0.0097	-1.9856	0.0239	1.6487
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.0978	0.1060	0.0060	0.0065	-0.9956	0.1600	1.6487
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.0472	0.0486	0.0026	0.0034	-0.2534	0.4001	1.6487
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	51.3542	48.2770	161.0040	279.1590	2.0602	0.0200	1.6487
Persen. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	34.1977	26.6245	294.2190	247.5890	4.3227	0.0000	1.6487
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	89.4438	83.4216	42.1974	81.2695	7.6742	0.0000	1.6487
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	51.1342	44.7662	88.6494	148.5325	5.7926	0.0000	1.6487
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.4881	93.5791	9.6492	16.6020	2.4904	0.0066	1.6487
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	53.3031	46.9281	221.4641	181.9565	4.2096	0.0000	1.6487
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.9515	97.2719	1.1112	60.8177	1.3832	0.0837	1.6487
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	54.7262	47.4309	193.7636	177.5506	5.0620	0.0000	1.6487
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	95.1577	94.1978	12.8306	79.7030	1.5209	0.0645	1.6487
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	38.1488	37.7180	200.6511	175.7467	0.2959	0.3837	1.6487
Rasio Guru Murid SD	0.0632	0.0711	0.0003	0.0004	-4.1649	0.0000	1.6487
Rasio Guru Murid SMP	0.0709	0.0783	0.0005	0.0003	-3.5171	0.0002	1.6487
Rasio Guru Murid SMA	0.0686	0.0707	0.0003	0.0001	-1.2675	0.1029	1.6487
Rasio Guru Murid SMK	0.0719	0.0847	0.0007	0.0006	-4.6968	0.0000	1.6487
Hasil UN SMP	52.3151	49.5722	41.9665	17.7075	4.5079	0.0000	1.6487
Hasil UN SMA IPA	53.4270	48.3561	54.5914	22.4929	7.3228	0.0000	1.6487
Hasil UN SMA IPS	48.1570	43.1540	46.2338	19.1314	7.8476	0.0000	1.6487
Hasil UN SMK	46.0652	42.1606	19.5566	23.7462	8.1068	0.0000	1.6487

Sumber: data diolah

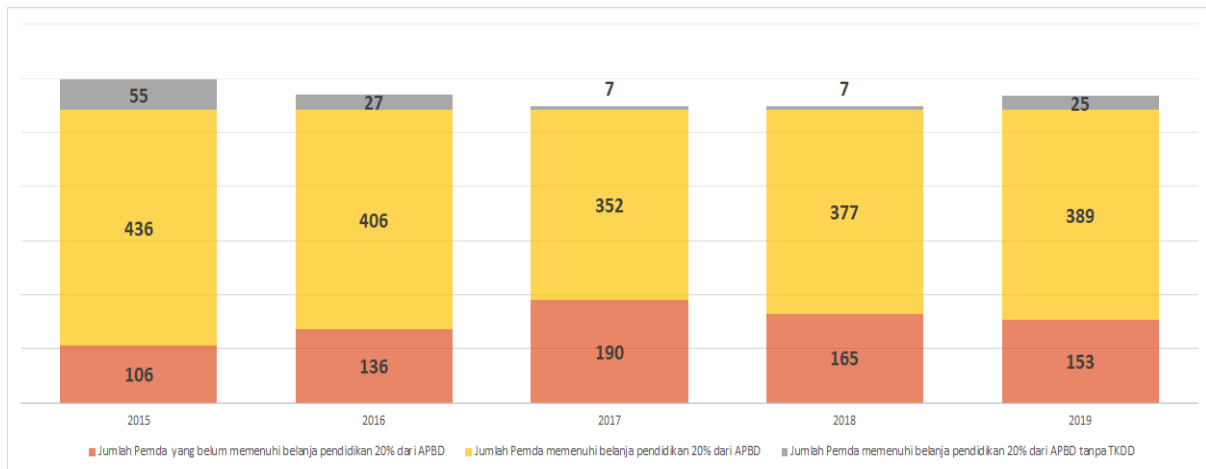
Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa kinerja pendidikan yang diukur dengan angka partisipasi kasar di jenjang PAUD dan SMP memiliki perbedaan yang signifikan (sig. < 0,05) antara kedua kawasan). Sementara itu, untuk APK jenjang SD dan SMA tidak terdapat perbedaan yang signifikan (sig. > 0,05). Untuk APM di ketiga jenjang pendidikan memiliki perbedaan yang signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Hasil pendidikan yang diukur melalui hasil Ujian Nasional (UN) juga menunjukkan hal yang sama, dimana kawasan barat memiliki hasil yang lebih baik daripada kawasan timur. Hal ini dapat dipahami karena sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tersebut juga memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa wilayah barat Indonesia memiliki riwayat pembangunan yang lebih cepat dibandingkan wilayah timur. Di bidang pendidikan terlihat dengan sedikitnya jumlah ruang kelas yang rusak berat dan banyaknya pengajar berkualitas di wilayah tersebut. Hadirnya sumber daya pendidikan yang lebih baik ini terlihat

dari nilai signifikansi dalam uji t di atas, dimana untuk jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP, terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini perlu menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya utamanya dengan beralih ke wilayah timur sebagai fokus pembangunan. Hingga kini, pembangunan di wilayah timur masih sporadis, hanya untuk wilayah tertentu saja, seperti Papua dan Papua Barat, namun hasilnya hingga kini masih belum terlihat.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa sebagian besar anggaran pendidikan Indonesia terdiri dari transfer fiskal ke sekolah dan ke pemerintah daerah. Sesuai amanat konstitusi, 20 persen belanja pendidikan dari nilai total belanja yang dianggarkan tidak hanya berlaku di pusat saja. Di daerah juga diterapkan amanat tersebut. Namun berdasarkan penelusuran data Neraca Pendidikan Daerah (Kemendikbud) dari tahun 2015 hingga 2019, belanja pendidikan daerah meskipun mencapai batas amanat konstitusi atau bahkan melebihi, nilai belanja pendidikan tersebut masih didominasi oleh dana transfer ke daerah dari pusat. Gambar 1 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum mengutamakan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Hanya sebagian kecil pemerintah daerah (25 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah di tahun 2019) yang mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tanpa mengandalkan transfer ke daerah. Jumlah pemerintah daerah yang mematuhi amanat tersebut pun tiap tahun bervariasi, artinya pendidikan masih belum menjadi misi utama daerah dalam pembangunan¹. Selain itu, terdapat bukti bahwa dana yang dimaksudkan untuk pendidikan kadang-kadang dialihkan ke prioritas lokal lain atau dibelanjakan secara tidak efektif (Suryadarma 2012, Al-Samarrai dan Cedran-Infantes 2013). Dalam mengatasi hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dari dinas pendidikan dan sekolah serta pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah tertinggal.

¹ Dari data tahun 2019 juga diketahui bahwa daerah yang memenuhi *mandatory spending* pendidikan tanpa bergantung pada transfer ke daerah tersebut merupakan daerah di wilayah Kawasan Barat Indonesia, yaitu: Provinsi Sumatera Barat; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Riau; Kab. Mandailing Natal; Kab. Limapuluh Kota; Kota Padang; Kota Dumai; Kab. Lahat; Kota Palembang; Kab. Banyuasin; Kab. Ogan Ilir; Kab. OKU Timur; Kab. Bekasi; Kab. Subang; Kab. Tasikmalaya; Kota Bandung; Kab. Blora; Kab. Klaten; Kab. Wonogiri; Kota Yogyakarta; Kab. Banyuwangi; Kab. Nganjuk; Kab. Lebak; Kab. Pandeglang; Kota Tangerang. Hal ini berarti Kawasan Timur Indonesia belum memenuhi amanat tersebut, sehingga wajar jika pembangunan pendidikan juga mengalami ketimpangan antar kawasan.

Gambar 1. Sebaran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Mandatory Spending Pendidikan, 2015-2019



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kondisi lemahnya pemenuhan *mandatory spending* di daerah ini merupakan bukti lemahnya koordinasi pembangunan pendidikan. Hal ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah dan akhirnya berdampak pada kualitas hasil pembelajaran. Dengan sedikitnya sampel pemerintah daerah yang memenuhi *mandatory spending* pendidikan maka perbandingan kualitas layanan dan hasil pendidikan di kawasan barat dan timur Indonesia dialihkan pada perbandingan daerah yang memiliki nilai anggaran belanja pendidikan yang bersumber dari APBD lebih besar dari belanja pendidikan dari transfer ke daerah bidang pendidikan. Kriteria ini dipilih karena dapat menunjukkan kemandirian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari hasil uji t, daerah dengan anggaran pendidikan dalam APBD lebih tinggi dari transfer ke daerah memiliki perbedaan yang signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Perbedaan rata-rata tersebut terutama di indikator APM SD, APM SMP, APM SMA, persentase jumlah guru berijazah untuk jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA, persentase jumlah guru bersertifikat untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP, rasio guru dan murid di semua jenjang pendidikan, dan hasil UN SMP, SMA, dan SMK. Indikator tersebut menunjukkan angka signifikansi yang kurang dari nilai alpha 0,05. Hasil ini tidak jauh berbeda dari uji t sebelumnya, yang menunjukkan terdapat *gap* yang signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia dalam hal pembangunan pendidikan.

Dengan hasil tersebut maka perlu kebijakan dari pemerintah untuk memusatkan pembangunan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Penerapan pengawasan pengelolaan keuangan di bidang pendidikan perlu diperkuat untuk memastikan agar pemerintah daerah melakukan belanja yang efektif. Hadirnya *reward/punishment* bagi pemerintah yang memenuhi amanat

UU Sisdiknas dalam memenuhi belanja wajib pendidikan perlu ditegakkan agar pembangunan pendidikan jadi optimal.

Tabel 6. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances - Tanpa Daerah Tertinggal dan Perbatasan dengan Pengalokasian Anggaran Pendidikan Daerah Melebihi Transfer ke Daerah

Indikator	Rata-rata		Varians		t-hitung	p-value (sig. 0,05)	t-tabel
	KBI	KTI	KBI	KTI			
APK PAUD (%)	40.3403	36.1804	375.8192	316.3110	1.1757	0.1210	1.6578
APK SD (%)	103.5292	103.4953	32.3949	52.6129	0.0285	0.4886	1.6578
APK SMP (%)	100.3904	100.4424	25.9483	149.8125	-0.0327	0.4870	1.6578
APK SMA (%)	94.5800	89.2336	188.4506	242.8662	1.9682	0.0257	1.6578
APM SD (%)	91.3695	88.7062	59.5113	61.1587	1.8261	0.0352	1.6578
APM SMP (%)	74.9659	70.6720	30.5330	117.1139	2.8865	0.0023	1.6578
APM SMA (%)	71.5520	63.9598	136.0106	106.0357	3.6113	0.0002	1.6578
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.0656	0.0663	0.0033	0.0027	-0.0754	0.4700	1.6578
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.1278	0.1707	0.0085	0.0133	-2.2516	0.0131	1.6578
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.1304	0.1441	0.0102	0.0117	-0.7011	0.2423	1.6578
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.0899	0.0987	0.0088	0.0114	-0.4721	0.3189	1.6578
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.0402	0.0391	0.0041	0.0022	0.0955	0.4620	1.6578
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	49.9974	43.1778	206.8861	287.4240	2.3567	0.0100	1.6578
Persen. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	30.9026	20.9822	333.1336	192.0188	3.1465	0.0010	1.6578
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	88.6632	82.7489	47.1858	69.5898	4.2218	0.0000	1.6578
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	49.1539	41.6000	119.9940	224.4223	3.1889	0.0009	1.6578
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.1632	92.9933	9.4365	15.2488	1.8272	0.0351	1.6578
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	49.3395	42.2178	251.1059	187.2092	2.5103	0.0067	1.6578
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.8461	95.8600	1.0433	182.0056	1.2809	0.1014	1.6578
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	52.0447	43.1844	262.4977	187.5241	3.0743	0.0013	1.6578
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	94.8816	92.2844	11.8559	210.4691	1.4951	0.0688	1.6578
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	37.8974	35.2467	301.3835	242.4421	0.8428	0.2005	1.6578
Rasio Guru Murid SD	0.0571	0.0653	0.0002	0.0003	-2.8040	0.0029	1.6578
Rasio Guru Murid SMP	0.0664	0.0739	0.0003	0.0003	-2.2150	0.0143	1.6578
Rasio Guru Murid SMA	0.0667	0.0708	0.0002	0.0002	-1.6895	0.0469	1.6578
Rasio Guru Murid SMK	0.0686	0.0829	0.0007	0.0010	-2.7027	0.0039	1.6578
Hasil UN SMP	53.1287	49.3769	60.0063	18.9827	2.9788	0.0018	1.6578
Hasil UN SMA IPA	54.7068	48.7182	77.1073	34.9176	4.0596	0.0000	1.6578
Hasil UN SMA IPS	49.3012	43.5318	63.2612	32.3444	4.2605	0.0000	1.6578
Hasil UN SMK	46.2284	41.6024	25.2920	56.5814	4.0508	0.0000	1.6578

Sumber: data diolah

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji perbedaan kinerja indikator pendidikan nasional di kawasan barat dan timur Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan barat Indonesia memiliki hasil pembangunan pendidikan yang lebih maju dibanding kawasan timur Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti APM, persentase jumlah guru berijazah D4/S1, dan persentase jumlah guru bersertifikat, rasio guru dan murid serta hasil ujian nasional. Perbedaan ini terjadi di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Perbandingan juga dilakukan dengan menggunakan kriteria keuangan berupa pengalokasian anggaran pendidikan daerah yang lebih tinggi dari anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan hasil yang serupa, bahwa kawasan barat memiliki pembangunan pendidikan yang lebih unggul daripada kawasan timur Indonesia.

5.2. Saran

Untuk mencapai potensi pendidikannya, Indonesia perlu meningkatkan lingkungan belajar dan mengajar, manajemen sekolah, dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Desentralisasi telah menciptakan tantangan besar terkait dengan kapasitas, serta sistem lemahnya *check and balances* dalam pemberian layanan pendidikan.

Solusi praktis untuk masalah ini diperlukan agar sistem pendidikan Indonesia bergerak maju. Ini termasuk hanya memilih kandidat dengan kualitas tertinggi untuk menjadi guru, mengarahkan sekolah, kabupaten dan provinsi untuk merencanakan dan menganggarkan secara efisien untuk mencapai standar nasional dalam pendidikan, dan memberikan program efektif dukungan teknis bagi guru dan sekolah untuk meningkatkan pembelajaran siswa.

Daftar Pustaka

- Al-Samarrai, S. 2013. Local Governance and Education Performance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. World Bank, Jakarta Indonesia.
- Al-Samarrai, S. and P. Cerdan-Infantes. 2013. "Where Did All the Money Go? Financing Basic Education in Indonesia." *Education in Indonesia*, 109-138.
- Al-Samarrai, S., M. C. Chang, A. B. Ragatz, S. Shaeffer, R. Stevenson and J. J. De Ree. 2013. *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making: Main Report (English)*. Directions in Development; Human Development, World Bank, Washington DC.
- Cerdan-Infantes, P., Y. Makarova, S. Al-Samarrai, D. Chen, P. Cerdan-Infantes, Y. Makarova, C. Al-Samarrai, D. Chen. 2013. *Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia*. Policy brief. World Bank, Washington DC.
- Delavallade, C. 2006. "Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries." *Journal of Economics and Finance* 30 (2): 222-239.
- Dwiyanto, A. 2011. *Functional Assignment in Indonesia: Policy issues and recommendations*.
- Kaufman, D. and A. Kraay. 2002. "Growth without Governance." World Bank Policy Research Working Paper Series No. 2928, World Bank, Washington, DC.
- Kaufman, D., A. Kraay, et al. 2010. *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*.
- KPPOD and Asia Foundation. 2011. *Local Economic Governance: A survey of Business Operators in 245 Districts/Municipalities in Indonesia*.

- Kristiansen, S. and M. Ramli. 2006. "Buying an Income: The Market for Civil Service Positions in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 28(2): 207-233.
- Lewis, M. and G. Pettersson. 2009. *Governance in Education: Raising Performance*.
- McCulloch, N. and E. Malesky. 2010. Does Better Local Governance Improve District Growth Performance in Indonesia?
- Paris. Rajkumar, A. S. and V. Swaroop. 2008. "Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?" *Journal of Development Economics* 86: 96-111.
- Rorris, A. 2012. "Annual Sector Financial Report 2011", Australia's Education Partnership with Indonesia. Performance Oversight and Monitoring (POM).
- Suryadarma, D. 2011. How Corruption Diminishes the Effectiveness of Public Spending on Education in Indonesia.
- UNCEN, UNIPA, et al. 2012. We Like to be Taught: A Study on Teacher Absenteeism in Papua and West Papua.
- USAID. 2009. Study of The Legal Framework for The Indonesian Basic Education Sector.
- USAID. 2010. Implementing School-Based Management in Indonesia. The DBE1 Experience: 2005 – 2010.
- Von Luebke, C. 2009. "The Political Economy of Local Governance: Findings from an Indonesian Field Study." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 45(2): 201-230.
- World Bank. 2009. *Investing in Indonesia's Education at The District Level: An Analysis of Regional Public Expenditure and Financial Management*. World Bank, Jakarta
- . 2010. *Governance Matters to Education Outcomes. The Indonesia Local Education Governance inDex (ILEGI): A Report Card of 50 Local Governments*. World Bank, Jakarta.
- . 2012a. *The BOSDA Improvement Program: Enhancing Equity and Performance Through Local School Grants*. World Bank, Jakarta.
- . 2012b. *Improving Public Service Delivery and Financial Management in the Gateway to Eastern Indonesia: South Sulawesi Public Expenditure Analysis 2012*.
- . 2012c. *Making Better Use of Teachers: Strengthening Teacher Management to Improve the Efficiency and Equity of Public Spending*. World Bank, Jakarta.
- . 2012d. *School Based Management in Indonesia*. Jakarta.

- . 2013a. "Additional Tables. Local Governance and Education Performance: A Survey of The Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts." World Bank, Jakarta.
- . 2013b. Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia. Education Public Expenditure Review. World Bank, Jakarta.
- . 2015. Reviewing 10 Years of Indonesia's School Grants Program. World Bank, Washington, DC. <https://www.indonesia-investments.com/upload/documents/World-Bank-Bantuan-Operasional-Sekolah-Indonesia-School-Grants-Program-Indonesia-Investments.pdf>
- . 2017. Indonesia Economic Quarterly: Decentralization that Delivers. December. World Bank, Jakarta, Indonesia.
- . 2018a. Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster. June. World Bank, Jakarta, Indonesia.
- . 2018b. World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. World Bank, Washington, DC.
- . 2018c. Mapping Indonesia's Civil Service. World Bank, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/643861542638957994/pdf/126376-Mapping-Indonesia-Civil-Service-14977.pdf>
- . 2018d. Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific. World Bank, Washington, DC.
- . 2019a. Indonesia Economic Quarterly: Oceans of Opportunity. June. World Bank, Jakarta
- . 2019b. World Development Report: The Changing Nature of Work. World Bank, Washington, DC.
- . 2019c. Ending Learning Poverty: What Will It Take? World Bank, Washington, DC.
- . Forthcoming. Primary Education in Remote Indonesia: Survey Results from West Kalimantan and East Nusa Tenggara.